

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang semula menganut pola pertanggungjawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola, mengatur dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Sistem otonomi daerah tersebut mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi tuntutan dan kebutuhan publik.

Anggaran publik dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam satu atau pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Governmental Accounting Standards Board (GASB) menjelaskan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, APBD sering sekali mengalami permasalahan. APBD harus mampu diandalkan dalam mengambil keputusan yang sama dengan tujuan pemerintah daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem atau tatanan

yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran daerah. Jika sistem penganggaran dalam APBD tidak tepat, maka dapat mengakibatkan timbulnya kesenjangan anggaran.

Pada awal tahun 2020, Bupati Sidoarjo tertangkap oleh KPK di Sidoarjo terkait kasus korupsi penyalahgunaan APBD. Ada empat proyek terkait operasi tangkap tangan Bupati Sidoarjo. Pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 M, pembangunan Pasar Porong Rp 17,5 M, pembangunan jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 M, dan proyek peningkatan Afvour Karang Pucang di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran senilai Rp 5,5 M. Dalam perkara dugaan korupsi itu, KPK telah menetapkan enam orang tersangka. Empat orang pejabat Sidoarjo sebagai penerima suap, dan dua pengusaha kontraktor selaku pemberi suap. (<https://surabaya.tribunnews.com>).

Senjangan Anggaran (budgetary slack) menurut Eka (2016) adalah perbedaan jumlah anggaran yang disusun oleh manajer setiap pusat pertanggungjawaban dengan estimasi terbaik organisasi, agar target anggaran dapat tercapai atau sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifitasnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya, atau perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran sesuai dengan estimasi sesungguhnya. Perbedaan antara jumlah yang di anggarkan dengan estimasi yang di anggarkan. Senjangan tersebut ditandai dengan adanya perilaku merendahkan target pendapatan sebagai salah satu cara untuk memudahkan pencapaian anggaran pemerintah daerah. Senjangan anggaran seperti ini

disebabkan oleh adanya perilaku individu untuk mengupayakan menyusun anggaran yang dirasa lebih mudah untuk dapat dicapai, serta aman ketika pertanggungjawaban anggaran tersebut. Ada enam indikator pengukuran menurut Dunk (1993:409) standar anggaran dapat meningkatkan produktivitas, pencapaian anggaran, monitor biaya disebabkan batasan anggaran, tuntutan pada anggaran, target anggaran menyebabkan efisiensi, dan target anggaran sulit dicapai.

Kompleksitas tugas merupakan keadaan dimana individu mendapatkan tugas yang membingungkan, banyak, tidak tersistem atau terstruktur, dan sulit dipahami. Menurut Bagas, dkk (2014) jika dalam organisasi individu mendapatkan suatu tugas yang begitu kompleks cenderung memicu terjadinya budgetary slack agar target budget dapat dicapai. Pegawai sering dihadapkan dengan situasi dimana ia memperoleh tugas yang banyak, kompleks, berbeda-beda, dan saling terkait satu dengan yang lainnya atau bisa disebut kompleksitas tugas. Ada enam indikator menurut Nopriyanti (2016) yaitu kejelasan tugas, pengaruh macam-macam tugas, pengetahuan tugas yang telah selesai, tugas fungsi bisnis tidak jelas, dan ketidakjelasan tugas. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bagas, dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas berpengaruh terhadap senjangan anggaran, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Bagus dan Made (2017) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Asimetri informasi menurut Tenriwaru (2015) yaitu perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan. Apabila informasi bawahan lebih baik dari pada atasan, maka bawahan mengambil kesempatan dalam partisipasi

penganggaran dengan memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi (agen), serta membuat anggaran yang mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran. Apabila bawahan memiliki informasi yang lebih baik, maka muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan perihal pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Menurut Supriyono dan Syakhorza (2003) ada enam komponen untuk mengukur asimetri informasi, antara lain informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan, hubungan input-output yang ada dalam operasi internal, kinerja potensial, teknis pekerjaan, kemampuan dalam menilai dampak potensial, pencapaian bidang kegiatan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tenriwaru (2015) menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Heny dan Ibnu (2017) menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran

Budaya organisasi menurut Glory dan Saprudin (2019) adalah nilai, norma, keyakinan, sikap, dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Implementasi budaya organisasi dalam sebuah organisasi dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang beretika sehingga dapat meminimalisir adanya senjangan anggaran. Artinya adalah semakin karyawan diberikan sebuah kepercayaan, maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran akan kecil. Menurut Ayu (2017) ada lima komponen untuk mengukur budaya organisasi yaitu pelayanan umum, ketepatan waktu, penyelesaian masalah,

prosedur pelayanan, dan sikap pimpinan dalam suasana kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Bagas, dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Glory dan Saprudin (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran

Berdasarkan fenomena dan tujuan penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah teori agensi. Teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menghubungkan aspek dari perilaku manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) merupakan pihak yang rasional serta memiliki kepentingan masing-masing. Teori ini diasumsikan kepentingan dari masing-masing individu sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen timbul terkait dengan kompensasi, manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Pada penelitian ini yang menjadi prinsipal adalah pemerintah pusat, sedangkan yang menjadi agen adalah sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan BPD. Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, prinsipal tidak tahu pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Responden dari penelitian ini yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan BPD di desa-desa kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil responden yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, kaur perencanaan, dan BPD di desa-desa

kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah karena variabel independen yang dirancang dalam penelitian ini dapat di terapkan pada responden tersebut. Di sisi lain, apabila peneliti menambahkan kepala desa dalam responden variabel, hasil penelitian akan kurang sempurna karena tidak akan ditemukan asimetri informasi. Variabel asimetri informasi hanya bisa dilakukan oleh bawahan saja atau agen.

Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena kurangnya adanya pengawasan atau pihak bawahan tidak bisa mengontrol atasan yang mengakibatkan penyalahgunaan terhadap anggaran, serta adanya beberapa perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu membuat penelitian ini penting untuk dilakukan, maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompleksitas Tugas, Asimetri Informasi, dan Budaya Organisasi terhadap Senjangan Anggaran pada Seluruh Desa di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat dibuat menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh senjangan anggaran?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh senjangan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.
2. Untuk menganalisa pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran.
3. Untuk menganalisa pengaruh budaya organisasi terhadap senjangan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan untuk akademik serta pembaca lainnya terhadap senjangan anggaran.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan lebih peduli terhadap adanya senjangan anggaran yang dapat mengakibatkan kebocoran anggaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menulis serta dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Materi yang tertera dalam laporan ini diringkas dan dimasukkan kedalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah dan fenomena yang terkait dengan topik yang diambil, didalam bab ini juga terdapat perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung landasan hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, mengidentifikasi variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik untuk menganalisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian serta aspek-aspek dari sampel penelitian secara garis besar. Selain itu, bab ini juga

menjelaskan tentang analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan yang terkait dengan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini dijelaskan juga saran yang akan diberikan kepada peneliti selanjutnya.

